

Katalog : 3205005.12



Maret

2022

**PROFIL  
KEMISKINAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



<https://>

Maret

**2022**

**PROFIL  
KEMISKINAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

# **PROFIL KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA, MARET 2022**

**ISSN** : 2615-8620  
**Katalog** : 3205005.12  
**No. Publikasi** : 12000.2269  
**Ukuran Buku** : 18,2 cm x 25,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xii + 66 hal

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Gambar Kulit:**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Diterbitkan Oleh:**

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

**Dicetak Oleh:**

CV.

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil  
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

## **TIM PENYUSUN**

### **PROFIL KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA, MARET 2022**

Penanggung Jawab Umum:  
Nurul Hasanudin, SST., M.Stat

Penanggung Jawab Teknis:  
Azantaro, SE., M.Si

Editor:  
Cahyono Panca Aridesyadi, SST

Penulis:  
Laila Syafrita Siregar, SST., M.M  
Akhmad Ignace Hariman S, SST., M.Si

Cover dan Infografis:  
Prio Arif Budiman, S. Si.



# KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat di Sumatera Utara. Salah satu aspek penting untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah diperlukan data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu.

Publikasi ini menyajikan metodologi, data dan informasi serta analisis kemiskinan Sumatera Utara Maret 2022. Diharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Utara sampai pada Maret 2022 sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk perencanaan pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi peneliti, akademisi, dan pemakai data umumnya.

Kepada semua pihak yang telah turut membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran bagi penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang sangat kami harapkan.

Medan, Desember 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Utara



Nurul Hasanudin



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Lampiran .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan Penulisan .....	5
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. KAJIAN LITERATUR .....</b>	<b>9</b>
2.1 Definisi Kemiskinan .....	9
2.2 Data Kemiskinan .....	11
2.3 Penghitungan Kemiskinan Makro .....	14
2.4 Indikator Kemiskinan .....	18
2.5 Distribusi Pengeluaran .....	19
<b>BAB III. ANALISIS KEMISKINAN .....</b>	<b>27</b>
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara .....	27
3.1 Garis Kemiskinan .....	29
3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin ( $P_0$ ) .....	38
3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan .....	40
3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan .....	42
<b>BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Gini Rasio .....	47
4.2 Kriteria bank Dunia .....	49
<b>PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
Daftar Pustaka .....	57
Lampiran .....	61

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Perbandingan antara Data Kemiskinan Makro dan Data Kemiskinan Mikro .....	13
Tabel 3.1 Garis Kemiskinan Sumatera Utara menurut Daerah dan Komponennya, Maret 2021 – Maret 2022 (Rp/kapita/bulan).....	31
Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara, Maret 2021 – Maret 2022 .....	38

# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Ilustrasi Garis Kemiskinan ..... 17
Gambar 2.2	Kurva Lorenz ..... 20
Gambar 3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2010 – 2022 ..... 27
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, Maret 2022 ..... 28
Gambar 3.3	Garis Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2021 – Maret 2022 (Rp/kapita/bulan)..... 30
Gambar 3.4	Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) terhadap Garis Kemiskinan Berdasarkan Daerah, Maret 2022 ..... 32
Gambar 3.5	<i>Share</i> Basket Komoditi Makanan Utama terhadap Garis Kemiskinan Makanan Berdasarkan Daerah, Maret 2022..... 33
Gambar 3.6	<i>Share</i> Basket Komoditi Non Makanan Utama terhadap Garis Kemiskinan Non Makanan Berdasarkan Daerah, Maret 2022..... 35
Gambar 3.7	<i>Share</i> Basket Komoditi Makanan dan Non Makanan Utama terhadap Garis Kemiskinan Berdasarkan Daerah, Maret 2022 ..... 37
Gambar 3.8	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara dan Indonesia Berdasarkan Daerah, Maret 2021 – Maret 2022 ..... 39
Gambar 3.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( <i>Poverty Gap Index – P<sub>1</sub></i> ) Sumatera Utara menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022..... 41
Gambar 3.10	Indeks Keparahan Kemiskinan ( <i>Poverty Severity Index – P<sub>2</sub></i> ) Sumatera Utara menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022..... 43
Gambar 3.11	Gini Rasio Sumatera Utara menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022 ..... 48

	Halaman
Gambar 3.12 Perbandingan Gini Rasio Sumatera Utara dan Indonesia, Maret 2021 – Maret 2022 .....	48
Gambar 3.13 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sumatera Utara menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2022 ...	49
Gambar 3.14 Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia menurut Kriteria Bank Dunia, Maret 2022 .....	50

# DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2022 .....	61
Lampiran 2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2022 .....	62
Lampiran 3 Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2022 .....	63
Lampiran 4 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2022 .....	64



# Klasifikasi Rumah Tangga Miskin (RTS)

konsumsi per kapita per bulan berada di bawah  $0,8 \times \text{GK}$

**Sangat Miskin**

konsumsi per kapita per bulan berada di antara  $0,8 \text{ GK}$  dan  $1 \text{ GK}$ .

**Miskin**

konsumsi per kapita per bulan berada di antara  $1 \text{ GK}$  dan  $1,2 \text{ GK}$ .

**Hampir Miskin**

konsumsi per kapita per bulan berada di antara  $1,2 \text{ GK}$  dan  $1,6 \text{ GK}$ .

**Rentan Miskin**



# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang kompleks dan mencakup berbagai aspek. Akibat kompleksitas yang dimilikinya, maka penanggulangan kemiskinan memerlukan program yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dan menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) dan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) untuk periode 2015-2030. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih peka terhadap isu kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan suatu kebijakan strategis yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan tersedianya data dan

Diperlukan tersedianya data dan informasi kemiskinan yang akurat dan *up to date* sehingga program pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.

informasi kemiskinan yang akurat dan *up to date* sehingga program pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.

Data kemiskinan yang bersumber dari BPS menjadi dasar dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah.

Ravallion (1992), menyebutkan bahwa pengukuran kemiskinan dapat dipercaya menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka (BPS & World Bank, 2002).

Di Indonesia, data mengenai kemiskinan telah tersedia di berbagai sumber. Namun demikian, untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi program pembangunan, pemerintah menggunakan data kemiskinan yang bersumber resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data kemiskinan yang bersumber dari BPS menjadi dasar dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. BPS selain mengeluarkan data kemiskinan makro juga mengumpulkan data kemiskinan mikro. Akan tetapi, data kemiskinan yang dirilis oleh BPS hanya data kemiskinan makro. Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk *geographical targeting* sedangkan kemiskinan mikro lebih banyak digunakan untuk keperluan *household targeting* seperti untuk *social protection* yang pengelolaan datanya dilakukan oleh Kemensos dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali dilakukan oleh BPS pada tahun 1984, dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin periode 1976-1981. Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas KOR dan pada tahun 2011-2015 menggunakan data gabungan Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III, dan IV. Sejak tahun 2015-sekarang, penghitungan kemiskinan dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret untuk menghitung kemiskinan level kabupaten/kota dan bulan September untuk menghitung kemiskinan level provinsi.

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sampai dengan Maret 2022
- b. Untuk mengetahui distribusi pengeluaran penduduk di Sumatera Utara Maret 2022

## **1.3 RUANG LINGKUP DAN DATA YANG DIGUNAKAN**

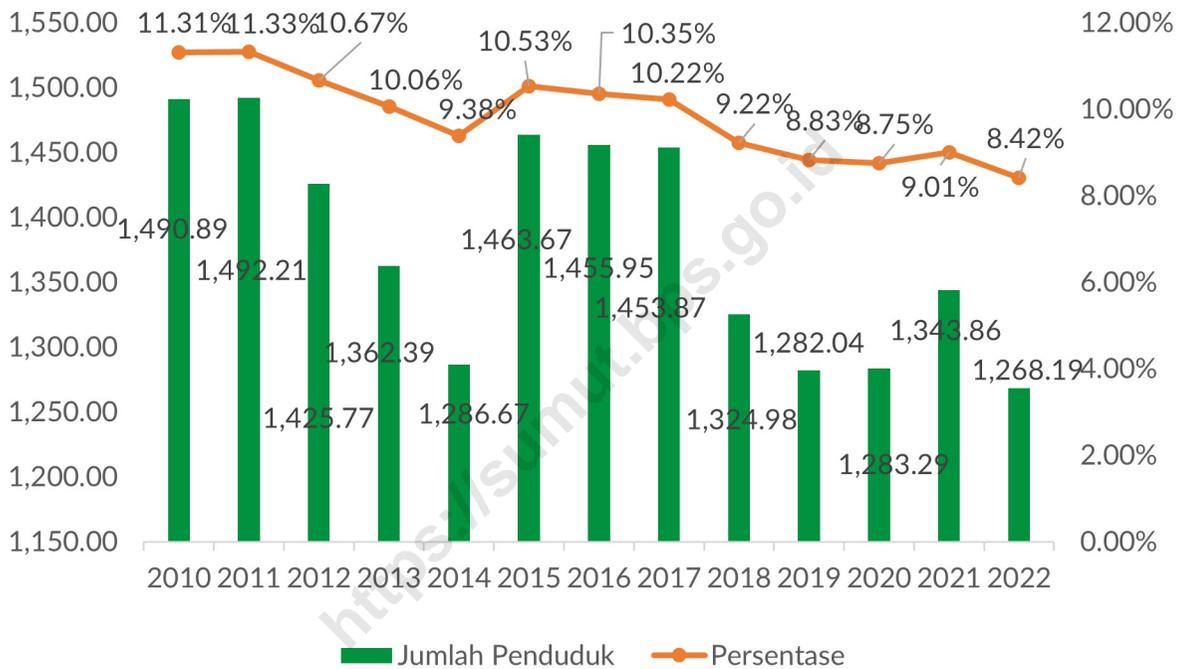
Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi Maret 2022. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas Maret 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 21.310 rumah tangga di Sumatera Utara.

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi publikasi, maka sistematika penulisan dibagi ke dalam empat bab, yaitu:

- Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, serta sistematika penulisan.
- Bab II. Kajian Literatur, menjelaskan tentang definisi kemiskinan, data kemiskinan, dan penghitungan kemiskinan makro.
- Bab III. Analisis Kemiskinan, menjelaskan tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan distribusi pengeluaran penduduk.
- Bab IV. Penutup.

# Jumlah (000 Jiwa) dan Persentase (%) Penduduk Miskin Sumatera Utara 2010-2022





# KAJIAN LITERATUR

## 2.1 DEFINISI KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004).

Menurut *World Bank* (Bank Dunia) dalam *World Bank Institute* (2005), kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Dari pandangan konvensional kemiskinan dipandang dari sisi moneter, yaitu kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin.

Pandangan mengenai kemiskinan berikutnya adalah bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi juga mencakup miskin nutrisi yang diukur dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan, misalnya dengan menggunakan indikator angka buta huruf. Selanjutnya pandangan yang lebih luas mengenai kemiskinan adalah kemiskinan ada jika masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai atau kesehatan yang

buruk, atau ketidakamanan, atau kepercayaan diri yang rendah, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak adanya hak bebas berpendapat.

Definisi kemiskinan yang digunakan di berbagai negara bermacam-macam. Kemiskinan sering dipandang sebagai ketidakmampuan untuk membayar biaya hidup minimal (Bank Dunia, 1990) walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa kemiskinan juga merupakan kurangnya akses terhadap jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan, informasi, serta kurangnya akses masyarakat terhadap partisipasi pembangunan dan politik. Definisi kemiskinan dapat juga dipandang dari sisi relatif dan sisi absolut:

#### 1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu Negara pada waktu tertentu.

#### 2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Indonesia melalui BPS mengadopsi definisi kemiskinan secara absolut yaitu dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tujuannya adalah untuk membandingkan kemiskinan secara umum dan menilai efek dari kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan antar waktu.

## 2.2 DATA KEMISKINAN

Pada dasarnya, data kemiskinan terdiri dari dua jenis yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk *geographical targeting* sedangkan kemiskinan mikro lebih banyak digunakan untuk keperluan *household targeting* seperti untuk *social protection*. Kedua data tersebut memiliki kriteria, pengukuran, dan cakupan kemiskinan yang berbeda.

BPS melakukan penghitungan data kemiskinan makro yang digunakan untuk *geographical targeting* untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan.

Pendekatan pertama, yaitu kemiskinan makro yang dihitung oleh BPS adalah data kemiskinan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Kemiskinan makro dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dari kebutuhan dasar ini dihitung suatu garis yang disebut garis kemiskinan. Selanjutnya, yang dikategorikan penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluaran konsumsinya ada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan moneter. Keberadaan data kemiskinan makro tidak hanya menjawab berapa jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin secara agregat, namun juga menelaah sejauh mana kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Pendekatan kedua adalah kemiskinan mikro yang penghitungannya menggunakan pendekatan non moneter yaitu dengan menggunakan kriteria akses

terhadap kebutuhan dasar. Data kemiskinan mikro dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan menggunakan metode *Proxy Means Testing (PMT)*. *PMT* digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga. Data kemiskinan mikro sering disebut data rumah tangga sasaran (RTS) yang digunakan untuk penyaluran program penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia, pendataan kemiskinan mikro sudah dilakukan empat kali. Pertama, data kemiskinan mikro yang bersumber dari Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE 2005), selanjutnya Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS 2008), Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011), yang terbaru adalah Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015). Perbedaan antara data kemiskinan makro dan mikro di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Perbandingan antara Data Kemiskinan Makro dan Data Kemiskinan Mikro

<b>Data Kemiskinan Makro</b>	<b>Data Kemiskinan Mikro</b>
<p>1. Metodologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep: <i>Basic Needs Approach</i></li> <li>- Pendekatan Moneter</li> <li>- Didasarkan pada Garis Kemiskinan Makanan (2100 kkal/kapita/hari) + Non Makanan esensial.</li> </ul>	<p>1. Metodologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep: Multi Dimensi</li> <li>- Pendekatan Non Moneter</li> <li>- Didasarkan pada Indeks atau <i>Proxy Means Test</i> (PMT) dari ciri-ciri Rumah Tangga Miskin (variabel non-moneter) yang dapat dikumpulkan dengan mudah.</li> </ul>
<p>2. Sumber data: Susenas</p>	<p>2. Sumber data: Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE-05), PPLS 2008, PPLS 2011, PBDT 2015</p>
<p>3. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan estimasi</p>	<p>3. Data menunjukkan jumlah RT sasaran – <i>by name by address</i></p>
<p>4. Digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis, tapi tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin</p>	<p>4. Digunakan untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, KIS, KIP, PSKS, dll)</p>

Sumber: BPS

Dalam perkembangannya, untuk mempermudah pengguna memahami data dan menentukan sasaran program, maka dikembangkan kategorisasi dalam mengklasifikasikan RTS oleh BPS, yaitu:

- 1) Sangat miskin, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di bawah 0,8 x Garis Kemiskinan (GK)
- 2) Miskin, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di antara 0,8 GK dan 1 GK.

- 3) Hampir miskin, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di antara 1 GK dan 1,2 GK.
- 4) Rentan miskin, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di antara 1,2 GK dan 1,6 GK.

### 2.3 PENGHITUNGAN KEMISKINAN MAKRO

Data kemiskinan yang bersumber dari Susenas merupakan data makro yang hanya menunjukkan jumlah agregat. Penentuan penduduk miskin diperoleh dengan menggunakan nilai garis kemiskinan, yaitu penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

BPS (2014) menyebutkan bahwa untuk mengukur kesejahteraan digunakan pendekatan yang berdasarkan pada pengeluaran per kapita. Setelah itu, dibangun standar minimum dari indikator kesejahteraan tersebut untuk membagi penduduk menjadi miskin dan tidak miskin. Standar minimum tersebut dikenal sebagai Garis Kemiskinan (GK). Untuk menentukan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan dasar, BPS menggunakan metode *Food Energy Intake (FEI)*. Pada metode *FEI* ini, nilai kuantitas dan harga setiap komoditi yang terpilih berubah sesuai dengan perubahan pola konsumsi dari penduduk referensi (20 persen penduduk yang pengeluarannya berada di atas Garis Kemiskinan Sementara) dan basket komoditi (sekelompok komoditi makanan dan non makanan terpilih yang dikonsumsi rumah tangga) ditentukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*).

Tahapan penghitungan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan kelompok penduduk referensi (*reference population*) yang didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal. Penduduk referensi merupakan 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Penentuan GKS didasarkan pada Garis Kemiskinan (GK) periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Berdasarkan penduduk referensi tersebut selanjutnya dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
- 2) Menentukan GKM yang merupakan penjumlahan dari nilai pengeluaran 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari (mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978). Formula dasar dalam menghitung GKM adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \times Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Keterangan:

$GKM_j$  = GKM daerah ke- $j$  (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kkal)

$P_{jk}$  = Harga komoditi ke- $k$  di daerah ke- $j$

$Q_{jk}$  = Rata-rata kuantitas komoditi ke- $k$  yang dikonsumsi di daerah ke- $j$

$V_{jk}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi ke- $k$  di daerah ke- $j$

$j$  = Daerah (perkotaan dan perdesaan)

Selanjutnya menentukan kebutuhan minimum makanan yang diperoleh dari nilai kalori setiap komoditi makanan yaitu  $GKM_j$  disetarakan dengan 2.100 kkal dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah ke- $j$  dari penduduk referensi.

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

$$= \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}} \times 2100$$

Keterangan:

$F_j$  = Kebutuhan minimum makanan di daerah ke- $j$ , yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari

$K_{jk}$  = Kalori dari komoditi ke- $k$  di daerah ke- $j$

$\overline{HK}_j$  = Harga rata-rata kalori di daerah ke- $j$

$V_{jk}$  = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi ke- $k$  di daerah ke- $j$

- 3) Menentukan GKNM yang merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan). Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) 2004. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$GKNM_j = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

Keterangan:

$GKNM_j$  = Pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah ke- $j$

$V_i$  = Nilai pengeluaran per komoditi/sub kelompok non-makanan ke- $i$  menurut daerah

$r_i$  = Rasio pengeluaran komoditi/subkelompok non makanan terhadap sub kelompok pengeluaran ke- $i$  menurut daerah

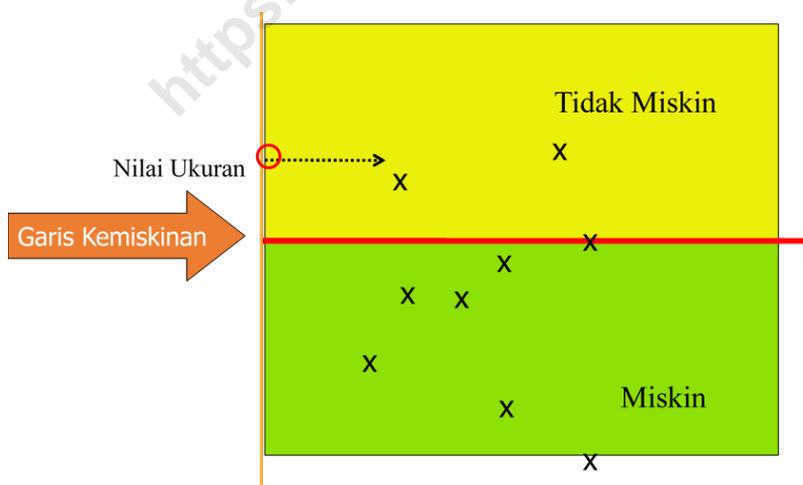
$i$  = Jenis komoditi non makanan terpilih ke- $i$  di daerah ke- $j$

$j$  = Daerah (perkotaan atau perdesaan)

- 4) Menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

$$GK = GKM + GKNM$$

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Gambar 2.1  
Ilustrasi Garis Kemiskinan

## 2.4 INDIKATOR KEMISKINAN

Secara umum terdapat tiga indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu persentase kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

a) Persentase Kemiskinan (*Head Count Index* – P<sub>0</sub>)

Digunakan untuk mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P<sub>1</sub>)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan.

c) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P<sub>2</sub>)

Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ukuran tingkat kemiskinan menggunakan Formula *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT)

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$\alpha$  = 0, 1, 2

$z$  = GK

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah GK ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = Jumlah penduduk

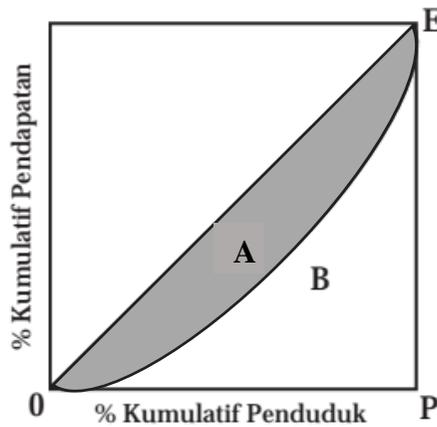
Ketiga indeks tersebut merupakan keluarga indeks kemiskinan yang sering digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan antar waktu maupun wilayah. Menurut Madden dan Smith (2000), kelemahan ketiga indeks tersebut dalam mengetahui perubahan tingkat kemiskinan adalah sensitif terhadap pemilihan garis kemiskinan maupun ukuran tingkat kemiskinan artinya apabila digunakan ukuran tingkat kemiskinan yang berbeda atau posisi garis kemiskinan diubah akan diperoleh kesimpulan yang berbeda.

## **2.5 DISTRIBUSI PENGELUARAN**

### **2.5.1 Gini Rasio**

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut. Ada sejumlah alat atau media untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Alat atau media yang lazim digunakan adalah Gini Rasio.

Gini Rasio adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Todaro (1989) menyatakan bahwa Gini Rasio akan dapat dijelaskan dengan menggunakan Kurva Lorenz. Dengan menggunakan Kurva Lorenz maka tingkat pemerataan akan dapat diketahui dengan jalan membandingkan antara bidang yang terletak diantara garis diagonal dengan Kurva Lorenz (bidang yang diarsir) dengan bidang setengah bujur sangkar.



Gambar 2.2  
Kurva Lorenz

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa sumbu horisontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut garis pemerataan sempurna, karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan.

Besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. *Gini Ratio* merupakan rasio (perbandingan) antara luas bidang A yang diarsir dengan luas segitiga OPE. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa bila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal. Artinya, daerah yang diarsir akan bernilai nol karena daerah tersebut sama dengan garis diagonalnya. Dengan demikian angka koefisiennya sama dengan nol. Sebaliknya, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga Koefisien Gini bernilai satu.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol, sedangkan

makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini makin mendekati satu.

Data yang diperlukan dalam penghitungan Gini Rasio:

- 1) Jumlah rumah tangga atau penduduk
- 2) Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Rumus untuk menghitung Gini Rasio:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dengan:  $P_i$  : Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- $i$

$Q_i$  : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- $i$

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika:

- ♦  $G < 0,4$  → Tingkat ketimpangan rendah
- ♦  $0,4 \leq G \leq 0,5$  → Tingkat ketimpangan sedang/*moderate*
- ♦  $G > 0,5$  → Tingkat ketimpangan tinggi

Menurut Todaro dan Smith (2006), Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang memenuhi empat kriteria, antara lain:

- 1) Prinsip anonimitas (*anonymity principle*)

Ukuran ketimpangan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ukuran tersebut tidak bergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin.

2) Prinsip independensi skala (*scale independence principle*)

Ukuran ketimpangan seharusnya tidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau negara, atau cara mengukur pendapatannya. Dengan kata lain, ukuran ketimpangan tersebut tidak bergantung pada apakah mengukur pendapatan dalam *dollar, sen, rupee* atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian negara itu secara rata-rata kaya atau miskin.

3) Prinsip independensi populasi (*population independence principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk).

4) Prinsip transfer (*transfer principle*)

Prinsip ini juga sering disebut sebagai prinsip *Pigou-Dalton*. Prinsip ini menyatakan bahwa dengan mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika seseorang mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya ke orang miskin (namun tidak sangat banyak hingga mengakibatkan orang miskin itu sekarang justru lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya tadi), maka akan dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

### 2.5.2 Kriteria Bank Dunia

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

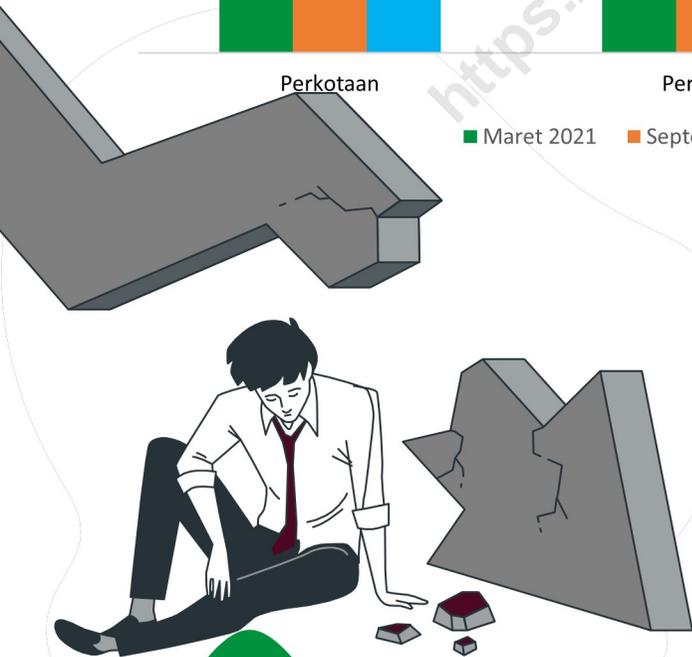
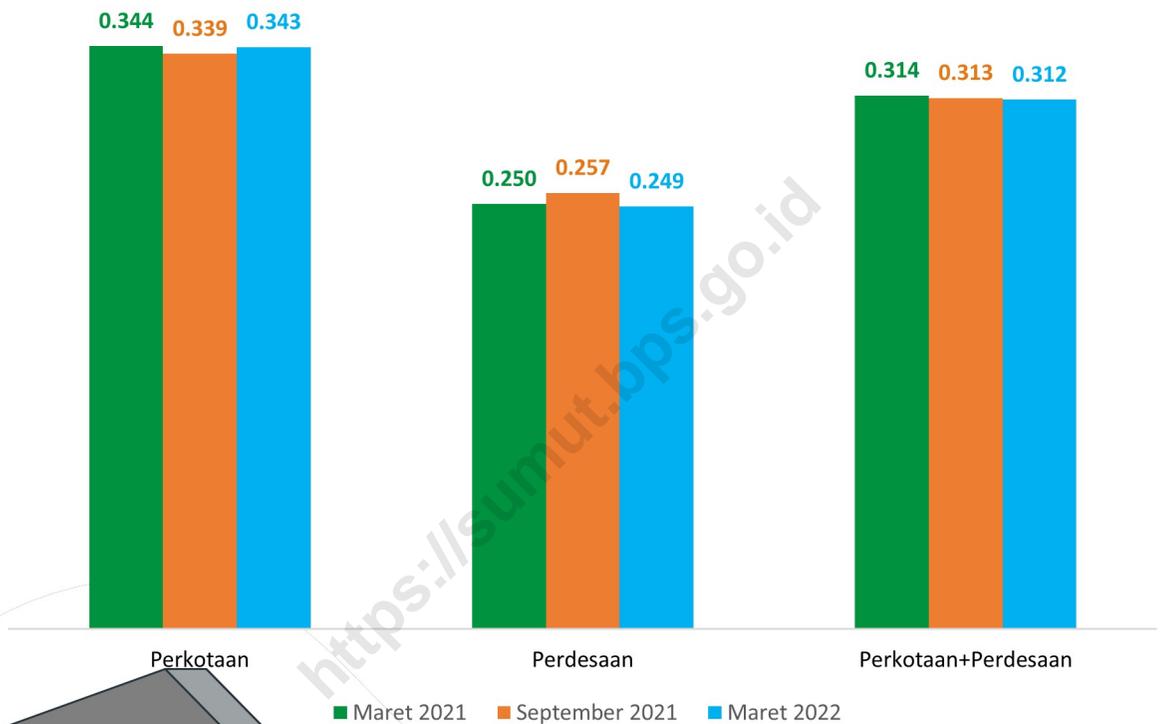
- 1) Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen.

- 2) Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen.
- 3) Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di atas 17 persen.

<https://sumut.bps.go.id>



# Gini Rasio Sumatera Utara menurut Daerah Maret 2020 - Maret 2021



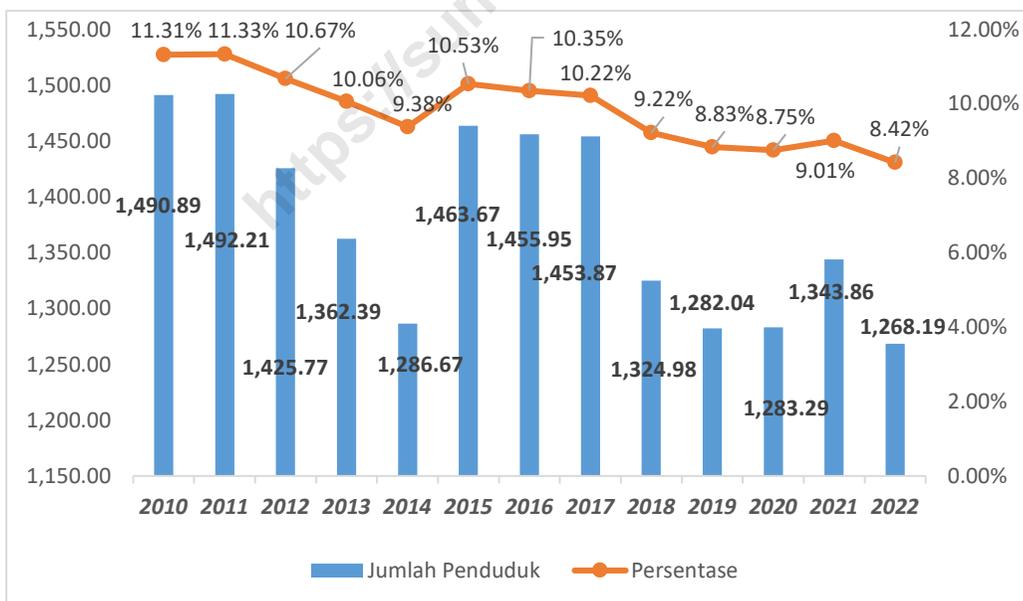


# ANALISIS KEMISKINAN

## PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN SUMATERA UTARA

Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode tahun 2010 – 2022 ditunjukkan pada Gambar 3.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Gambar 3.1  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara  
Tahun 2010 – 2022

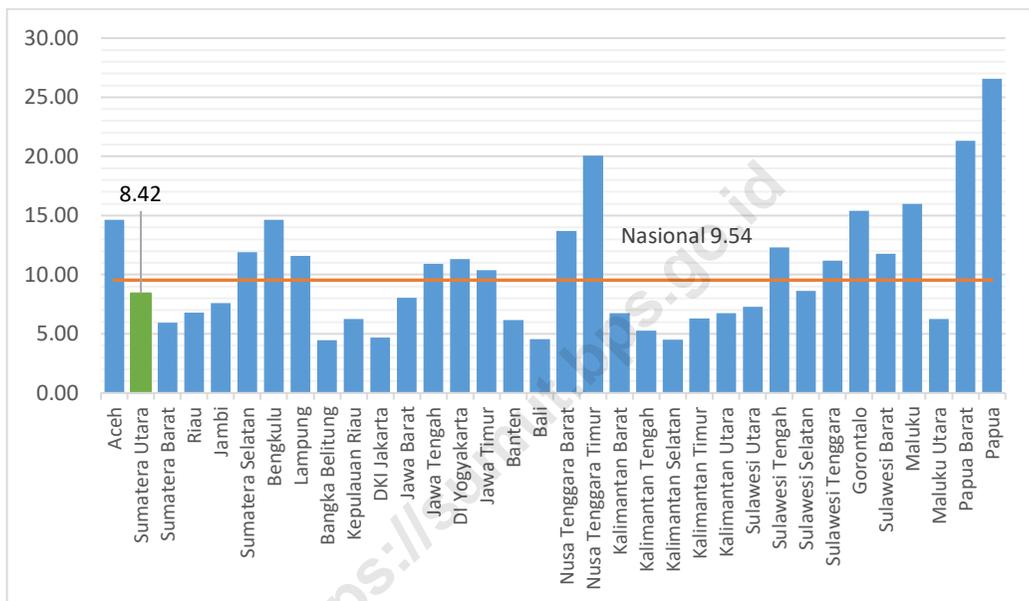


Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenast), 2010-2022

Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2010 – 2022 sebesar 222,70 ribu jiwa, yaitu dari 1.490,89 ribu jiwa pada Maret 2010

menjadi 1.268,19 ribu jiwa pada Maret 2022. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 11,31 persen pada Maret 2010 menjadi 8,42 persen pada Maret 2022.

Gambar 3.2  
Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi  
Maret 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, pada Maret 2021 meskipun persentase penduduk miskin di Sumatera Utara berada sedikit di bawah persentase penduduk miskin Indonesia, akan tetapi persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup tinggi dan menempati peringkat ke-17 dari 34 provinsi. Persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 9,54 persen dan Sumatera Utara 8,42 persen.

Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara menempati peringkat ke-17 dari 34 provinsi.

Tiga provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di kawasan timur Indonesia antara lain Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Bali.

## **Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2021 – Maret 2022**

Perubahan tingkat kemiskinan melalui analisis tren tingkat kemiskinan selama periode Maret 2021 – Maret 2022 mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

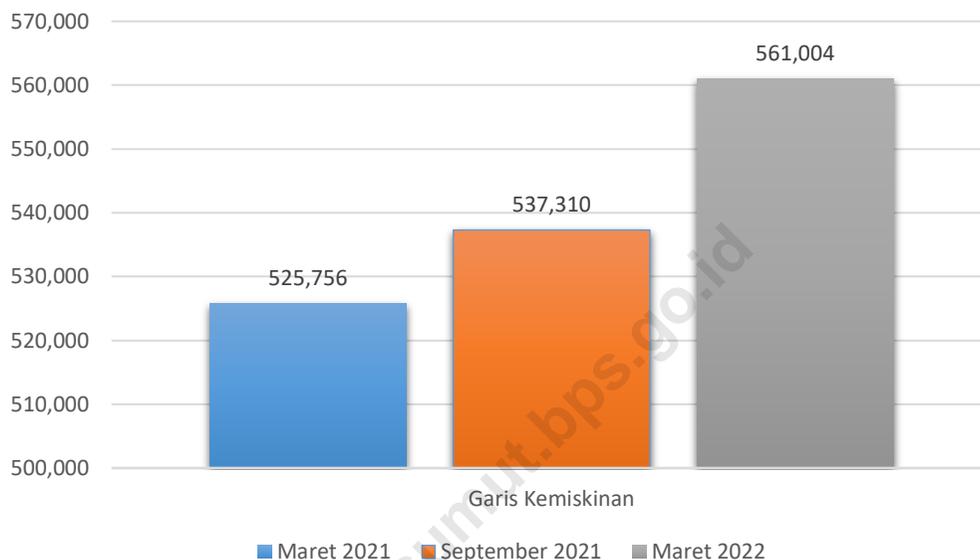
### **3.1 Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan merupakan komponen penting dalam menentukan penduduk miskin. Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada sejumlah komoditi yang ditentukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) dan dikonsumsi oleh kelompok penduduk referensi (20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara). Komoditi dikelompokkan menjadi dua yaitu basket komoditi makanan dan non makanan. Basket komoditi makanan digunakan untuk menentukan garis kemiskinan makanan, sedangkan basket komoditi non makanan digunakan untuk menentukan garis kemiskinan non makanan.

Berdasarkan garis kemiskinan, penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis

kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan.

Gambar 3.3  
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2021– Maret 2022  
(Rp/kapita/bulan)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021 – Maret 2022

Perkembangan garis kemiskinan selama periode Maret 2021– Maret 2022 cenderung meningkat secara konsisten. Garis kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2021 adalah Rp.525.756,- per kapita per bulan. Angka ini pada Maret 2022 meningkat sebesar 6,70 persen hingga menjadi Rp.561.004,- per kapita per bulan.

Berdasarkan daerah, garis kemiskinan di perkotaan meningkat sebesar Rp. 40.136,- per kapita per bulan atau 7,39 persen yaitu dari Rp.543.085,- per kapita per bulan pada Maret 2021 meningkat menjadi Rp 583.221,- per kapita per bulan pada Maret 2022. Sedangkan, garis kemiskinan di perdesaan meningkat sebesar Rp. 29.499,- per kapita per bulan atau 5,84 persen yaitu dari Rp. 504.685,- per kapita per bulan pada Maret 2021 meningkat menjadi Rp. 534.184,- per kapita per bulan pada Maret 2022.

Tabel 3.1  
Garis Kemiskinan Sumatera Utara menurut Daerah dan Komponennya  
Maret 2021 – Maret 2022 (Rp/kapita/bulan)

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makanan	Non Makanan	Total
<b><u>Perkotaan</u></b>			
Maret 2021	397.996	145.089	543.085
September 2021	409.313	147.124	556.437
Maret 2022	431.588	151.633	583.221
<b><u>Perdesaan</u></b>			
Maret 2021	391.979	112.706	504.685
September 2021	399.971	114.016	513.987
Maret 2022	415.301	118.883	534.184
<b><u>Perkotaan+Perdesaan</u></b>			
Maret 2021	395.104	130.652	525.756
September 2021	404.860	132.451	537.310
Maret 2022	423.760	137.244	561.004

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021 - Maret 2022

Garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan di perdesaan. Hal ini disebabkan karena harga komoditi di perkotaan umumnya lebih tinggi dari harga di perdesaan serta komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan lebih beragam, sehingga menyebabkan pengeluaran penduduk di perkotaan menjadi lebih tinggi dibanding di perdesaan.

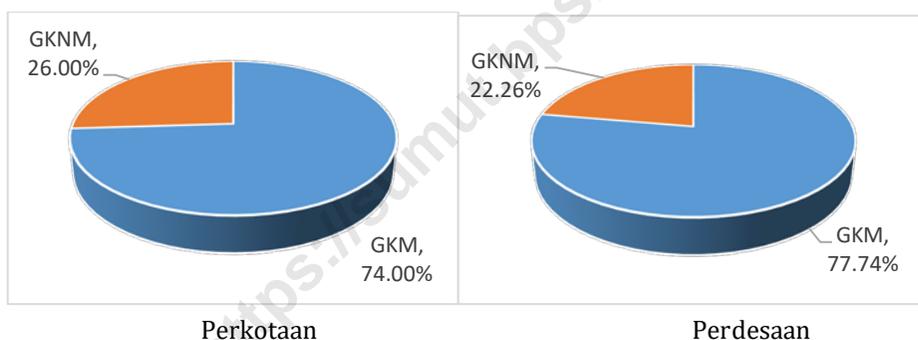
#### **A. Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan**

Dilihat berdasarkan daerah, baik di perkotaan maupun perdesaan garis kemiskinan makanan mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Di perdesaan, kontribusi garis

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap Garis Kemiskinan (GK).

kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 77,74 persen, dan kontribusi garis kemiskinan non makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 22,26 persen. Sedangkan di perkotaan, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,00 persen, dan kontribusi garis kemiskinan non makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 26,00 persen. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan makanan di daerah perkotaan maupun perdesaan masih merupakan komponen utama bagi kelangsungan hidup masyarakat di Sumatera Utara.

Gambar 3.4  
Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) terhadap Garis Kemiskinan Berdasarkan Daerah, Maret 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

## B. *Share Basket Komoditi Makanan*

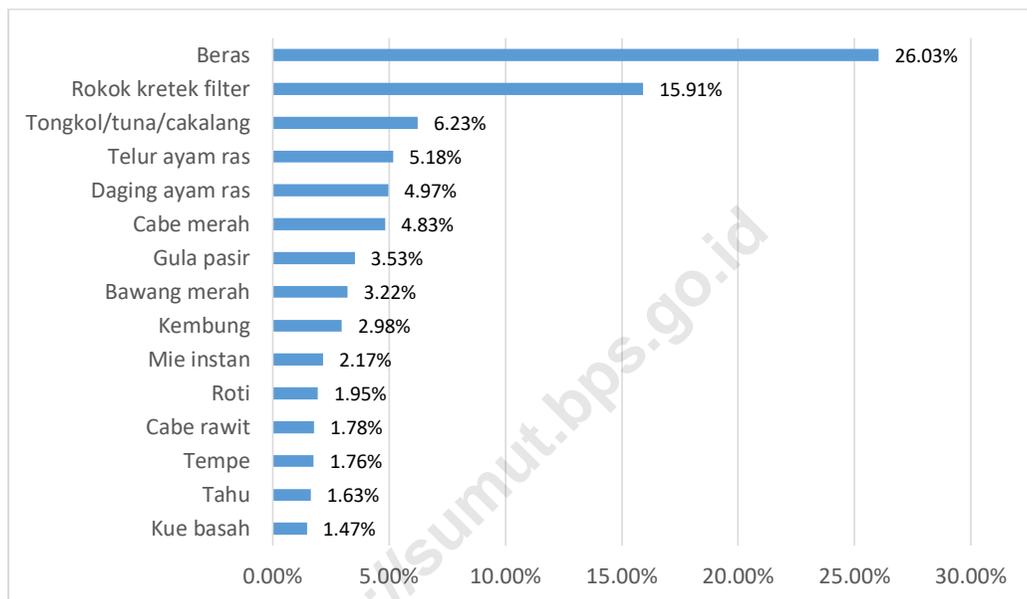
Garis kemiskinan makanan mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap garis kemiskinan dibandingkan garis kemiskinan non makanan. Komoditi makanan yang memberikan sumbangan paling besar dalam pengukuran garis kemiskinan makanan adalah beras. Hal ini wajar karena

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan garis kemiskinan yang secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan ataupun penurunan jumlah penduduk miskin adalah melalui pengendalian harga beras.

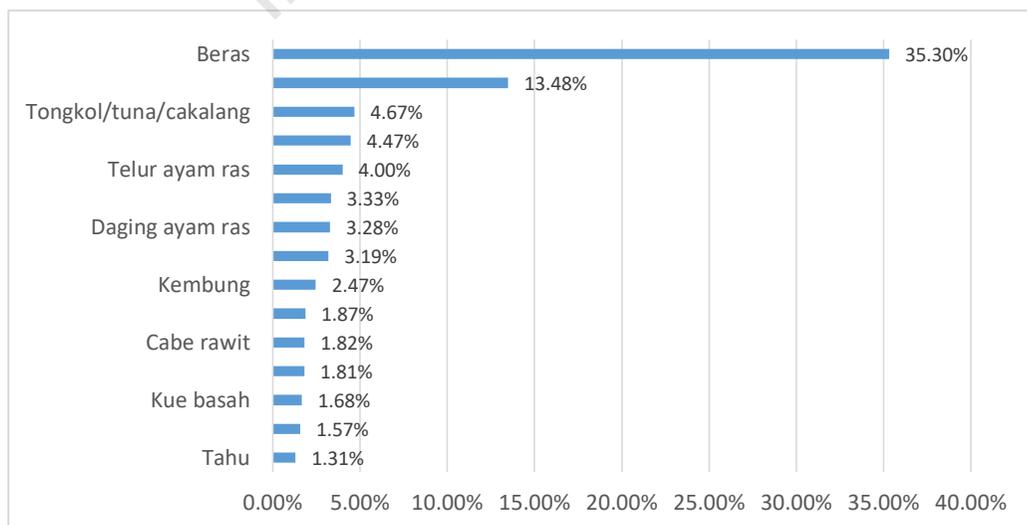
beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya.

Gambar 3.5  
Share Basket Komoditi Makanan Utama terhadap  
Garis Kemiskinan Makanan Berdasarkan Daerah, Maret 2022

**Perkotaan**



**Perdesaan**



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

Pada Maret 2022, sumbangan beras terhadap garis kemiskinan makanan adalah sebesar 26,03 persen di perkotaan dan 35,30 persen di perdesaan. Terlihat bahwa hampir setengah garis kemiskinan makanan di perdesaan dan lebih dari seperempat garis kemiskinan makanan perkotaan dibentuk dari pengeluaran untuk membeli beras. Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan garis kemiskinan yang secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan ataupun penurunan jumlah penduduk miskin adalah melalui pengendalian harga beras.

Komoditi makanan lainnya yang mempunyai sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan makanan adalah rokok kretek filter yaitu sebesar 15,91 persen di perkotaan dan sebesar 13,48 persen di perdesaan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian oleh para pengambil kebijakan maupun peneliti, karena rokok kretek filter adalah komoditi yang tidak menghasilkan kalori tapi memberikan sumbangan yang relatif besar terhadap garis kemiskinan makanan. Seyogyanya, pengeluaran untuk rokok kretek filter oleh penduduk tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat.

Selain beras, rokok kretek filter merupakan komoditi yang memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan.

### C. *Share* Basket Komoditi Non Makanan

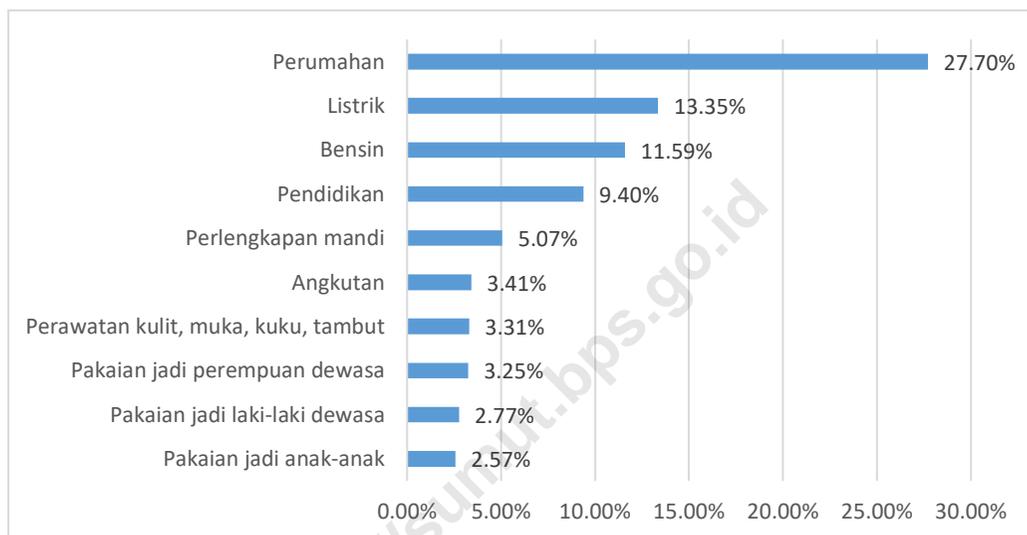
Pada Maret 2022, komoditi non makanan yang memberikan sumbangan terbesar kepada garis kemiskinan non makanan adalah perumahan. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan papan utama masyarakat.

*Share* komoditi perumahan terhadap garis kemiskinan non makanan adalah 27,70 persen di perkotaan dan 25,33 persen di perdesaan. Selain itu, komoditi yang memberikan sumbangan terbesar selanjutnya untuk perkotaan

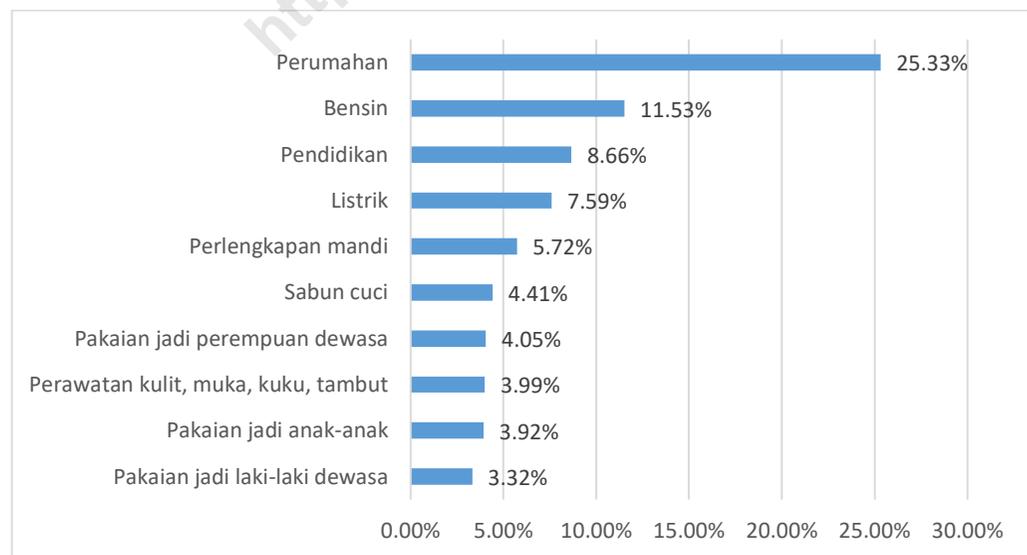
adalah listrik sebesar 13,35 persen, sedangkan untuk perdesaan adalah bensin sebesar 11,56 persen.

**Gambar 3.6**  
*Share* Basket Komoditi Non Makanan Utama terhadap  
Garis Kemiskinan Non Makanan Berdasarkan Daerah, Maret 2022

**Perkotaan**



**Perdesaan**



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

#### D. *Share* Basket Komoditi Makanan dan Non Makanan terhadap Garis Kemiskinan

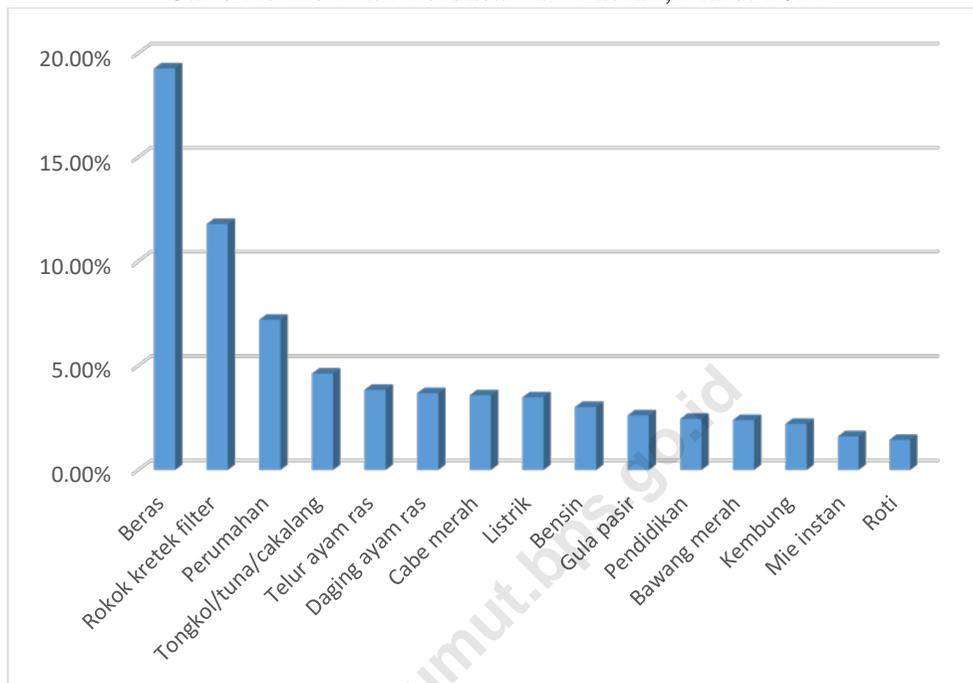
Apabila dilihat secara keseluruhan, *share* basket komoditi yang terdiri dari 52 jenis komoditi makanan dan 36 jenis komoditi non makanan, terhadap garis kemiskinan, tiga komoditi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis

Tiga komoditi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, dan perumahan.

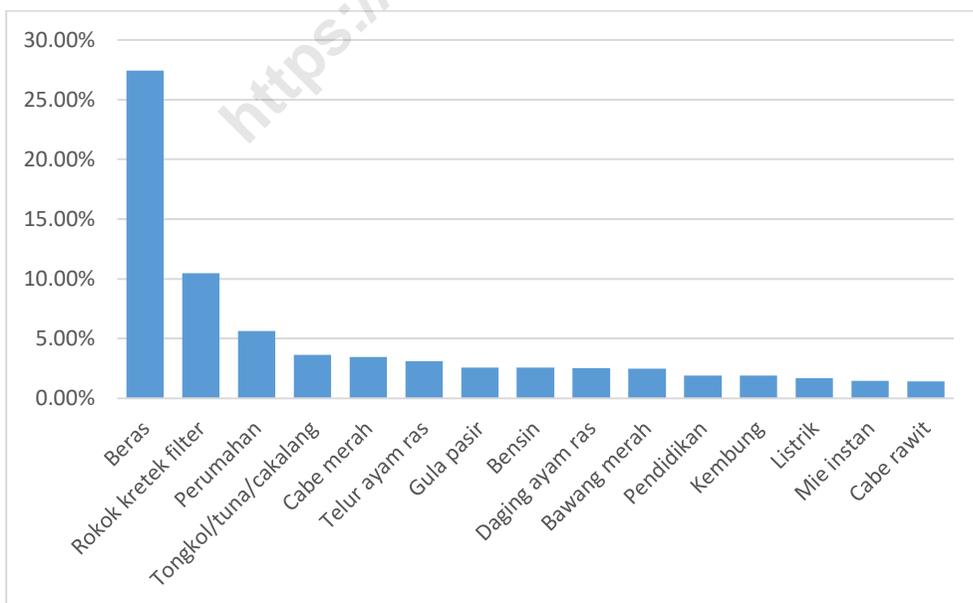
kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, dan perumahan. Di perkotaan, *share* komoditi tersebut terhadap garis kemiskinan secara berturut-turut sebesar 19,26 persen, 11,78 persen, dan 7,20 persen. Sedangkan di perdesaan sebesar 27,44 persen 10,48 persen dan 5,64 persen.

Berdasarkan *share* basket komoditi terhadap garis kemiskinan, diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun program-program pembangunan. Pemerintah diharapkan bisa mengendalikan harga komoditi yang memberikan sumbangan besar terhadap garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena peningkatan harga dari sejumlah komoditi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa mempengaruhi peningkatan garis kemiskinan.

Gambar 3.7  
*Share* Basket Komoditi Makanan dan Non Makanan Utama terhadap  
 Garis Kemiskinan Berdasarkan Daerah, Maret 2022



Perkotaan



Perdesaan

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

### 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P<sub>0</sub>)

Perkembangan penduduk miskin di Sumatera Utara selama periode Maret 2021– Maret 2022 mengalami penurunan. Pada periode Maret 2021-Maret 2022, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 75,670 orang atau secara persentase berkurang sebesar 0,59 poin, yaitu dari 1.343,86 ribu orang (9,01 persen) pada Maret 2021 menjadi 1.268,19 ribu orang (8,42 persen) pada Maret 2022.

Tabel 3.2  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara  
Maret 2021– Maret 2022

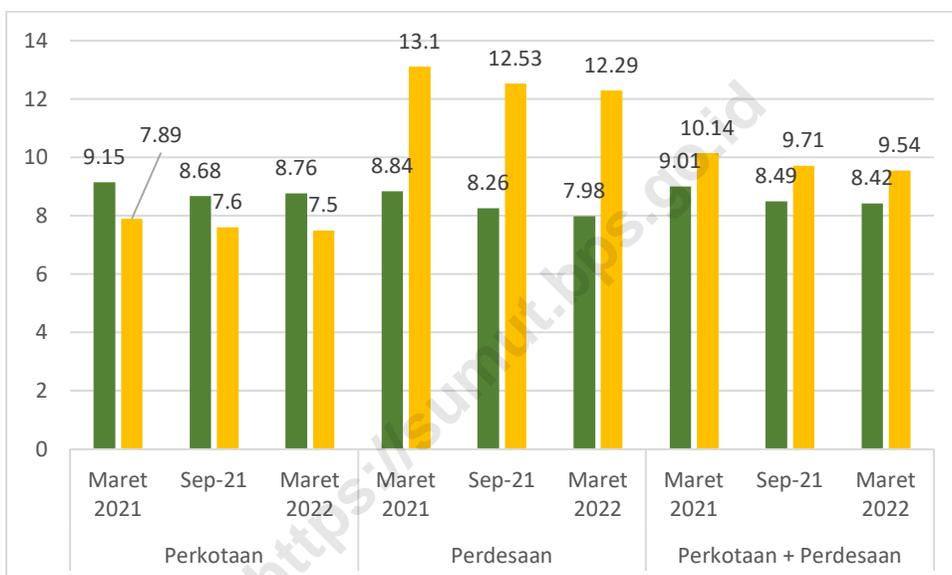
Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)
<b><u>Perkotaan</u></b>				
Maret 2021	755,81	9,15		
September 2021	725,04	8,68		
Maret 2022	739,86	8,76	(15,95)	(0,39)
<b><u>Perdesaan</u></b>				
Maret 2021	588,05	8,84		
September 2021	548,03	8,26		
Maret 2022	528,33	7,98	(59,72)	(0,86)
<b><u>Perkotaan+Perdesaan</u></b>				
Maret 2021	1.343,86	9,01		
September 2021	1.273,07	8,49		
Maret 2022	1.268,19	8,42	(75,67)	(0,59)

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021 – Maret 2022

Apabila dilihat berdasarkan daerah, pada periode Maret 2021 – Maret 2022, penduduk miskin di perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,39 poin, yaitu dari 9,15 persen menjadi 8,76 persen atau berkurang sebanyak 15,95

ribu orang, yaitu dari 755,81 ribu orang menjadi 739,86 ribu orang. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 0,86 poin dari 8,84 persen menjadi 7,98 persen atau berkurang sebanyak 59,72 ribu orang, yaitu dari 588,05 ribu orang menjadi 528,33 ribu orang.

Gambar 3.8  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara dan Indonesia Berdasarkan Daerah, Maret 2021 – Maret 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021 – Maret 2022

Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin Indonesia adalah sebesar 10,14 persen mengalami penurunan hingga menjadi 9,54 persen pada Maret 2022. Demikian juga di Sumatera Utara, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 9,01 persen pada Maret 2021 menjadi 8,42 persen pada Maret 2022.

Apabila dilihat berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin di perkotaan Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin daerah perkotaan di Indonesia, akan tetapi sebaliknya persentase

penduduk miskin di perdesaan Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia.

Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin di perkotaan Sumatera Utara adalah 8,76 persen dan di perkotaan Indonesia adalah 7,50 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan Sumatera Utara adalah 7,98 persen dan di perdesaan Indonesia adalah 12,29 persen.

### **3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index - P<sub>1</sub>*)**

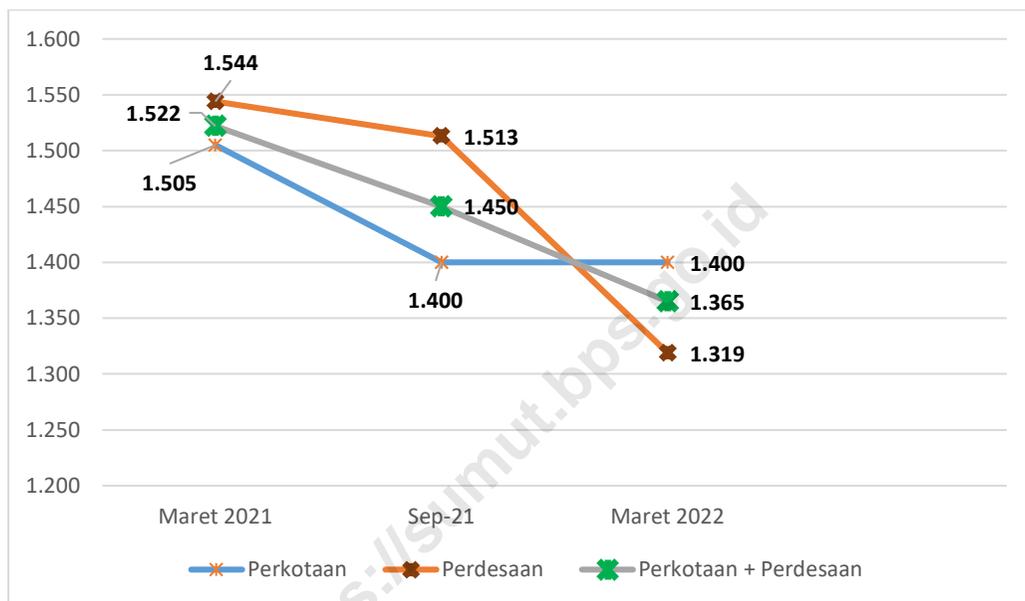
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Agar tujuan pembangunan lebih tepat sasaran maka informasi kemiskinan tidak cukup hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi dibutuhkan informasi lain, salah satunya adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan selain untuk upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan  $P_1$ ) merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat.

Semakin kecil nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Intervensi program pengentasan kemiskinan relatif lebih efektif untuk

mengurangi tingkat kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

Gambar 3.9  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P<sub>1</sub>*) Sumatera Utara menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021 – Maret 2022

Selama periode Maret 2021 – Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumatera Utara menurun sebesar 0,157 poin, yaitu dari 1,522 pada Maret 2021 menjadi 1,365 pada Maret 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan.

Dari segi wilayah, Indeks Kedalaman Kemiskinan Maret 2022 di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada periode Maret 2021 – Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,105 poin, yaitu dari 1,505 pada Maret 2021 menjadi 1,400 pada Maret 2022, artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

Demikian juga, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perdesaan, pada periode Maret 2021 – Maret 2022 mengalami penurunan sebesar 0,225 poin, yaitu dari 1,544 pada Maret 2021 menjadi 1,319 pada Maret 2022. Artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung semakin mendekati garis kemiskinan.

Selama periode Maret 2021 – Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumatera Utara baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

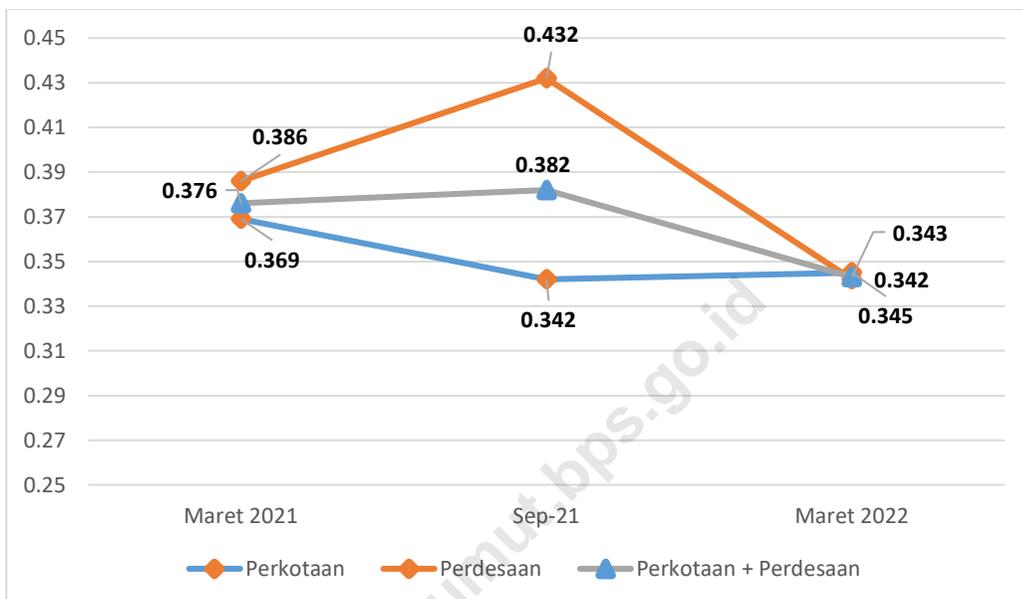
### 3.4 Indeks Kearifan Kemiskinan (*Poverty Severity Index - P<sub>2</sub>*)

Indeks Kearifan Kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan  $P_2$ ) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Indeks Kearifan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selama periode Maret 2021 – Maret 2022, Indeks Kearifan Kemiskinan Sumatera Utara menurun sebesar 0,033 poin, yaitu dari 0,376 pada Maret 2021 menjadi 0,343 pada Maret 2022. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Sumatera Utara semakin rendah.

Apabila dilihat dari segi wilayah, pada Maret 2022, Indeks Kearifan Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan memiliki ketimpangan yang lebih tinggi daripada ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan. Pada Maret 2021, Indeks Kearifan Kemiskinan di perkotaan sebesar 0,369, mengalami sedikit penurunan sebesar 0,024 poin menjadi 0,345 pada Maret 2022.

Gambar 3.10  
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P<sub>2</sub>*) Sumatera Utara  
menurut Daerah, Maret 2021 – Maret 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021 – Maret 2022

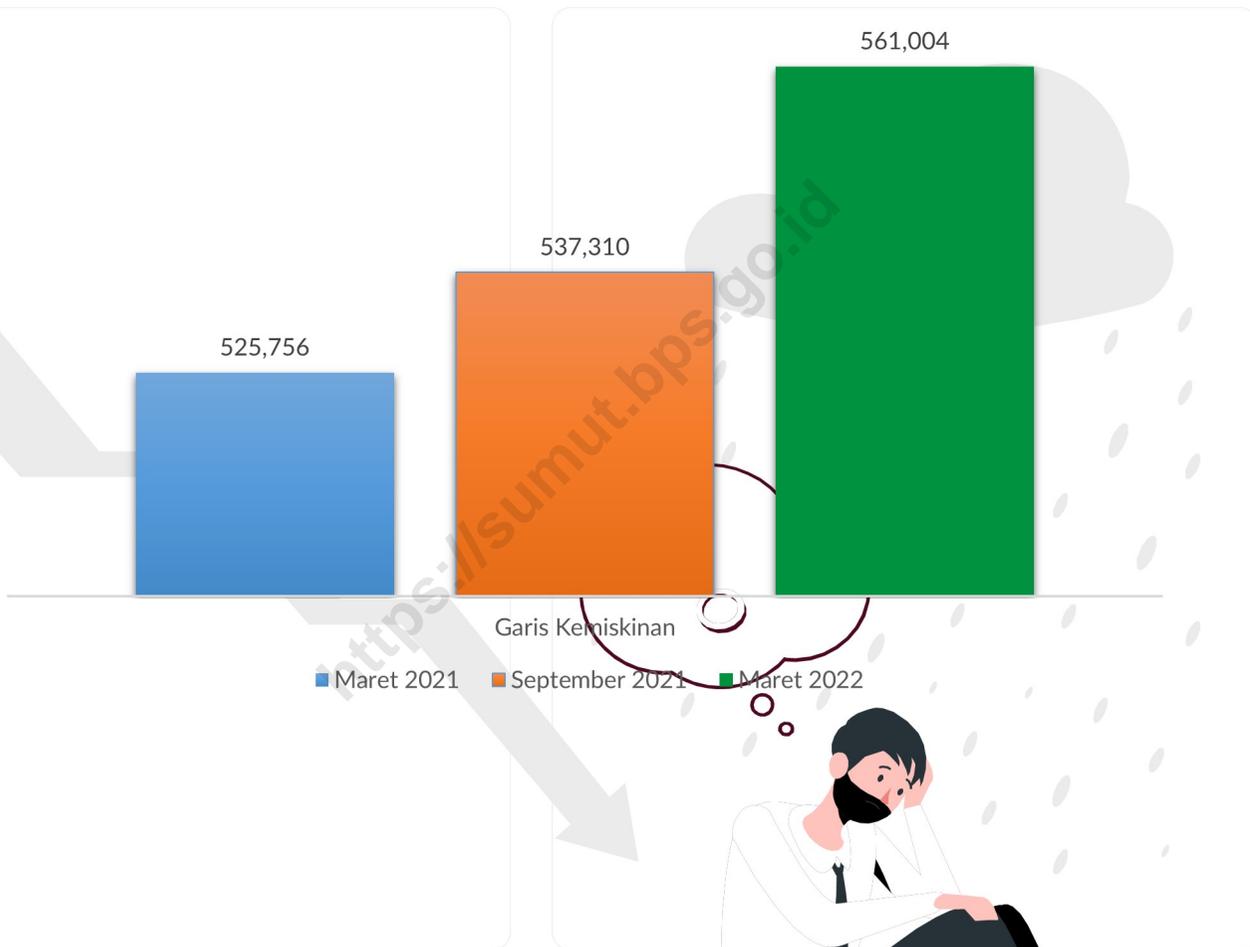
Selama kurun waktu setahun terakhir, Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan, demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan di perdesaan. Artinya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan semakin rendah.

Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2022, Indeks Keparahan Kemiskinan di perdesaan 0,342, mengalami penurunan sebesar 0,044 poin dibandingkan Maret 2021

yang sebesar 0,386. Hal ini memberikan gambaran bahwa selama Maret 2021 – Maret 2022, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan semakin rendah.



# Garis Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2021 – Maret 2022 (Rp/kapita/bulan)





# ANALISIS KETIMPANGAN

## 4. DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK SUMATERA UTARA

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, aspek penting yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai ketidakmerataan atau kesenjangan distribusi pengeluaran penduduk. Kesenjangan distribusi pengeluaran merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang umumnya terjadi karena ketidakmerataan dari distribusi program pembangunan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Kebijakan pembangunan yang menempatkan kota sebagai pusat pertumbuhan justru menghasilkan ketimpangan wilayah.

### 4.1. Gini Rasio

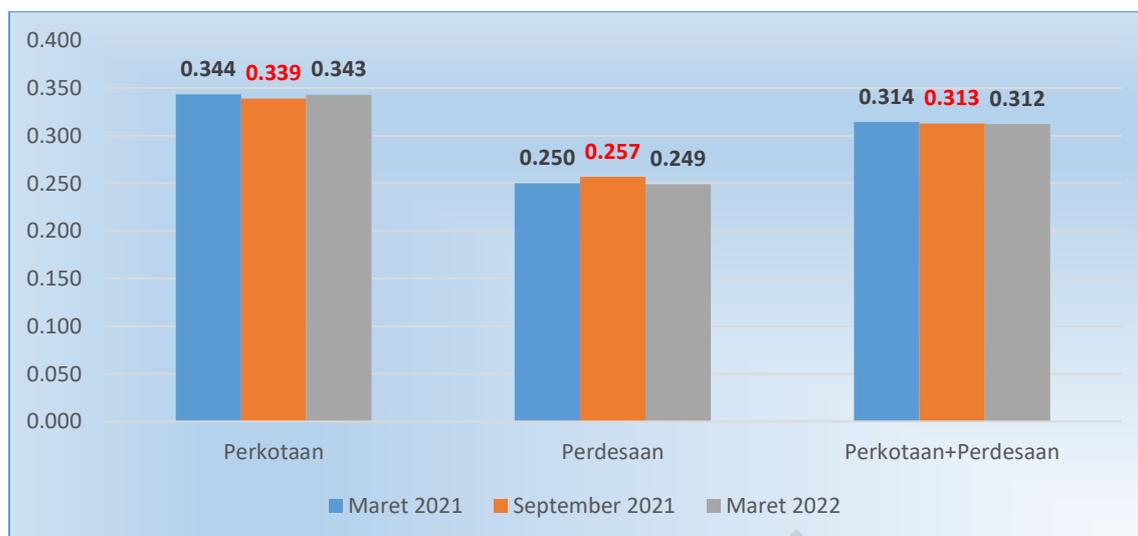
Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk adalah Gini Rasio. Selain itu, Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk.

Secara umum angka Gini Rasio pada Maret 2021 - Maret 2022 di Sumatera Utara mengalami penurunan, begitupun menurut daerah, baik di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,001 poin. Peningkatan angka Gini Rasio mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin memburuk. Sebaliknya, penurunan angka Gini Rasio mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin membaik.

Pada Maret 2021 - Maret 2022 angka Gini Rasio di Sumatera Utara mengalami penurunan, sedangkan di daerah perkotaan justru sebaliknya mengalami peningkatan.

Pada Maret 2021, angka Gini Rasio Sumatera Utara sebesar 0,314, selama kurun waktu satu tahun, pada Maret 2022 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,002 menjadi 0,312. Apabila dilihat berdasarkan daerah, angka Gini Rasio di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada Maret 2021, angka Gini Rasio di perkotaan adalah 0,344 dan di perdesaan adalah 0,250. Pada Maret 2022, angka Gini Rasio di perkotaan 0,343 sedangkan di perdesaan sebesar 0,249. Artinya bahwa selama satu tahun terakhir, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan maupun perdesaan relatif menurun.

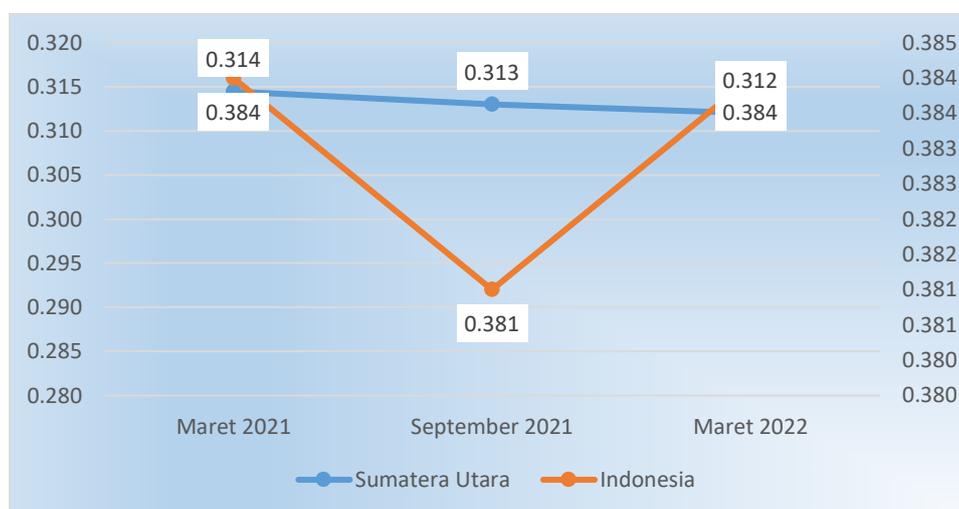
Gambar 3.11  
Gini Rasio Sumatera Utara menurut Daerah  
Maret 2021 - Maret 2022



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021 - Maret 2022

Apabila dibandingkan secara nasional, angka Gini Rasio Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan dengan angka Gini Rasio Indonesia. Pada periode Maret 2021 - Maret 2022, angka Gini Rasio Sumatera Utara dan Indonesia menunjukkan kecenderungan pola yang berbeda, Gini Rasio Indonesia tidak mengalami perubahan, sementara Gini Rasio Sumatera Utara mengalami sedikit penurunan. Pada Maret 2021, Gini Rasio Sumatera Utara sebesar 0,314 dan Gini Rasio Indonesia 0,384. Selama setahun, Gini Rasio Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,002 poin menjadi 0,312 dan Gini Rasio Indonesia tidak mengalami perubahan sehingga tetap pada angka 0,384 pada Maret 2022.

Gambar 3.12  
Perbandingan Gini Rasio Sumatera Utara dan Indonesia  
Maret 2021 - Maret 2022



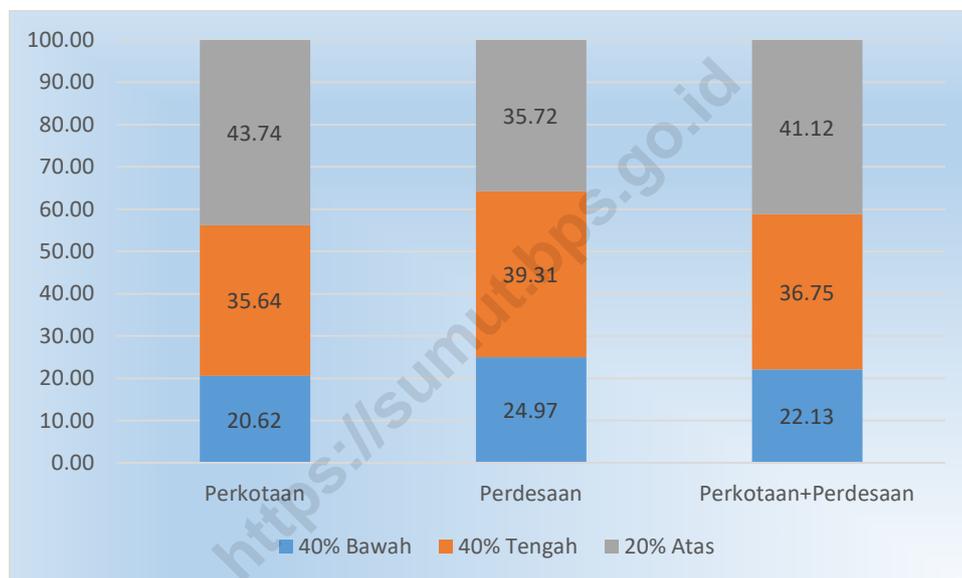
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021 - Maret 2022

## 4.2 Kriteria Bank Dunia

Untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk, selain Gini Rasio juga bisa digunakan indikator lain yaitu Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada Maret 2021 ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara tergolong kategori rendah (*low inequality*), karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah di atas 17 persen, yaitu sebesar 22,13 persen.

Gambar 3.13  
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sumatera Utara menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2022



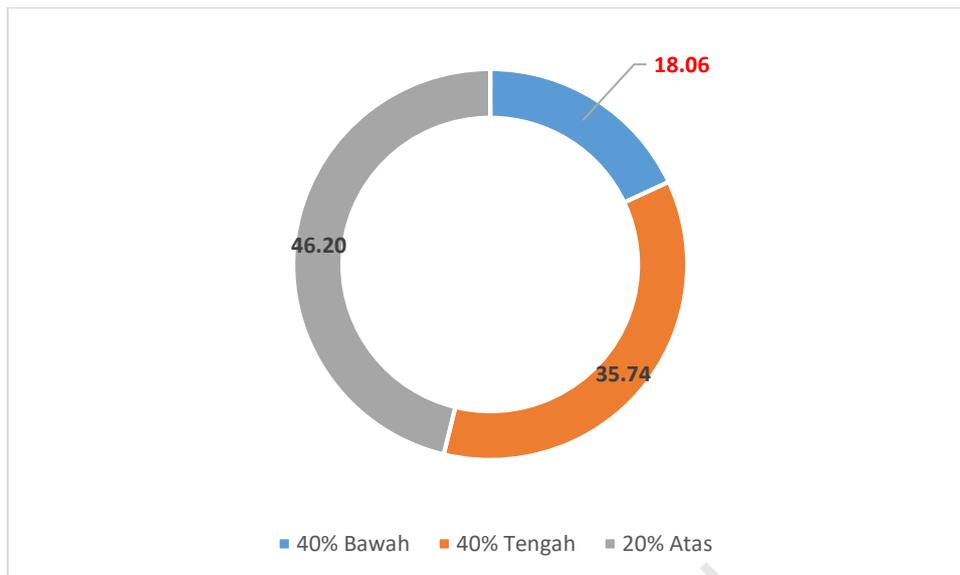
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

Apabila dilihat berdasarkan daerah pada Maret 2022 baik di perkotaan maupun perdesaan ketimpangan pengeluaran penduduk termasuk kategori rendah (*low inequality*). Persentase

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, pada Maret 2022 baik di perkotaan maupun perdesaan ketimpangan pengeluaran penduduk di Sumatera Utara termasuk kategori rendah (*low inequality*).

pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di perkotaan (20,62 persen) lebih rendah dibanding perdesaan (24,97 persen).

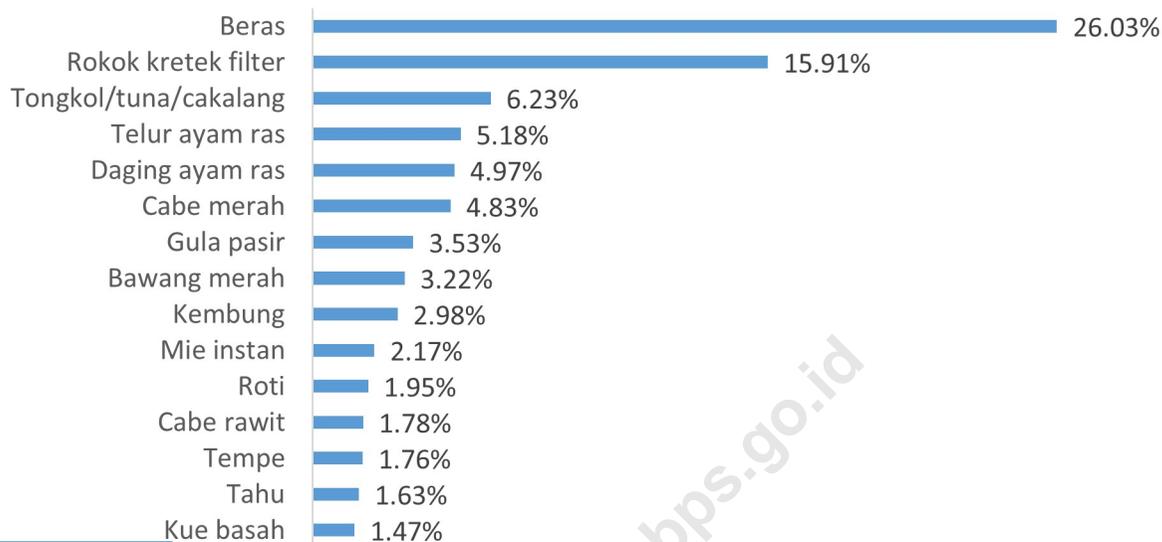
Gambar 3.14  
Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia menurut Kriteria Bank Dunia, Maret 2022



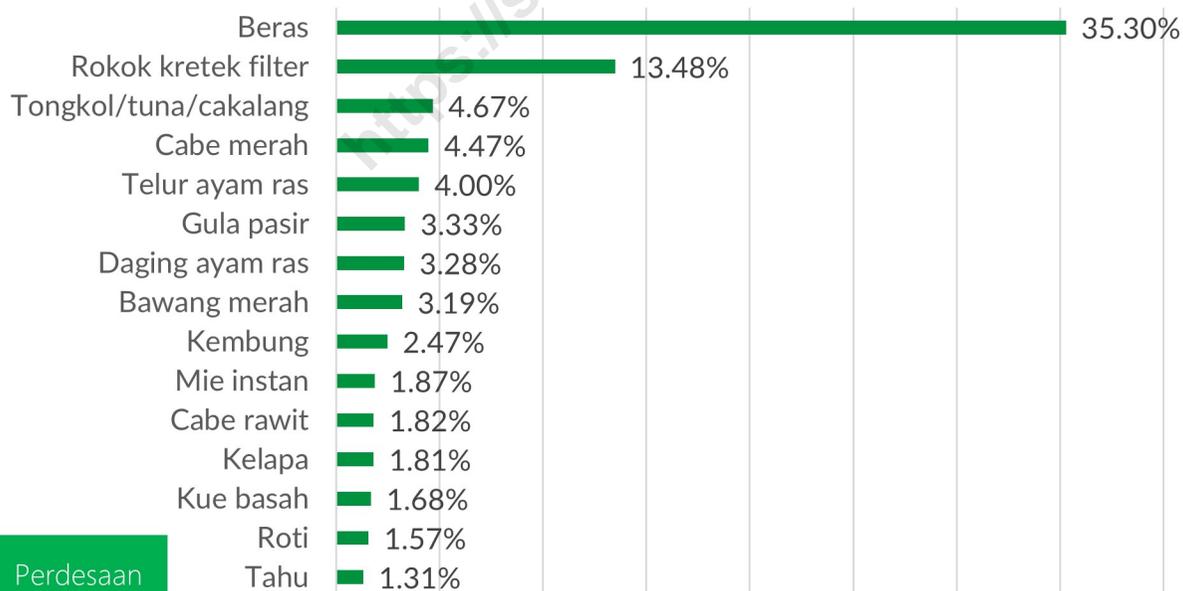
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

Apabila dibandingkan dengan angka nasional, berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada Maret 2022 ketimpangan pengeluaran penduduk baik di Indonesia maupun Sumatera Utara termasuk kategori rendah (*low inequality*) yaitu 22,13 persen untuk Sumatera Utara dan 18,06 persen untuk Indonesia.

# Share Basket Komoditi Makanan Utama terhadap Garis Kemiskinan Makanan Berdasarkan Daerah (%), Maret 2022



Perkotaan



Perdesaan



## PENUTUP

Perkembangan penduduk miskin di Sumatera Utara selama periode Maret 2021 - Maret 2022 mengalami penurunan secara konsisten. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 75,67 ribu orang atau secara persentase berkurang sebesar 0,59 poin, yaitu dari 1.343,86 ribu orang (9,01 persen) pada Maret 2021 menjadi 1.268,19 ribu orang (8,42 persen) pada Maret 2022. Apabila dilihat berdasarkan daerah, pada periode Maret 2021 - Maret 2022, penduduk miskin di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan yang lebih besar dibanding di perdesaan, yaitu sebesar 0,39 poin, yaitu dari 9,15 persen menjadi 8,76 persen atau turun sebanyak 15,95 ribu orang, yaitu dari 755,81 ribu orang menjadi 739,86 ribu orang. Penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,87 poin dari 8,84 persen menjadi 7,98 persen atau turun sebanyak 59,72 ribu orang yaitu dari 588,05 ribu orang menjadi 528,33 ribu orang.

Perkembangan garis kemiskinan selama periode Maret 2021 - Maret 2022 cenderung meningkat secara konsisten. Garis kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2021 adalah Rp 525.756,- per kapita per bulan. Angka ini pada Maret 2022 meningkat sekitar 6,28 persen hingga menjadi Rp 561.004,- per kapita per bulan. Berdasarkan daerah, garis kemiskinan di perkotaan meningkat sebesar Rp 40.136,- per kapita per bulan atau 6,88 persen, yaitu dari Rp 543.085,- per kapita per bulan pada Maret 2021 meningkat menjadi Rp 583.221,- per kapita per bulan pada Maret 2022. Sedangkan, garis kemiskinan di perdesaan meningkat sebesar Rp 29.499,- per kapita per bulan atau 5,52 persen, yaitu dari Rp 504.685,- per kapita per bulan pada Maret 2021 meningkat menjadi Rp 534.184,- per kapita per bulan pada Maret 2022.

Dilihat berdasarkan daerah, baik di perkotaan maupun perdesaan garis kemiskinan makanan mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perkotaan lebih besar dibanding perdesaan. Di perdesaan, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 77,75 persen, dan kontribusi garis kemiskinan non makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 22,26 persen. Sedangkan di perkotaan, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,00 persen dan kontribusi garis kemiskinan non makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 25,99 persen.

Selama periode Maret 2021 - Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) Sumatera Utara turun sebesar 0,157 poin, yaitu dari 1,522 pada Maret 2021 menjadi 1,365 pada Maret 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan.

Namun pada Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) Sumatera Utara, selama periode Maret 2021 - Maret 2022 turun sebesar 0,033 poin, yaitu dari 0,376 pada Maret 2021 menjadi 0,343 pada Maret 2022. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Sumatera Utara semakin rendah.

Pada Maret 2021 - Maret 2022, angka Gini Rasio di Sumatera Utara mengalami penurunan, terutama di daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan mengalami peningkatan. Angka Gini Rasio Sumatera Utara mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,002 dari 0,314 pada Maret 2021 menjadi 0,312 pada Maret 2022. Apabila dilihat berdasarkan daerah, angka Gini Rasio di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada Maret 2021, angka Gini Rasio di perkotaan adalah 0,344 dan di perdesaan adalah 0,250. Pada Maret 2022, angka Gini Rasio di perkotaan turun 0,343 dan di perdesaan juga mengalami penurunan menjadi 0,249.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada Maret 2022 ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara tergolong kategori rendah (*low inequality*), karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah di atas 17 persen, yaitu sebesar 22,13 persen. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,62 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,97 yang artinya keduanya berada pada kategori ketimpangan rendah.

<https://sumut.bps.go.id>

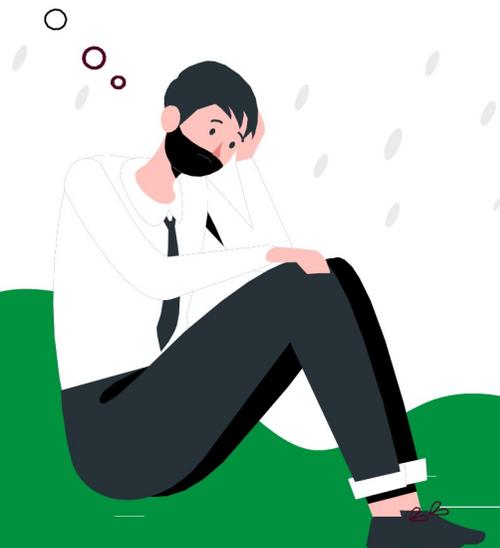
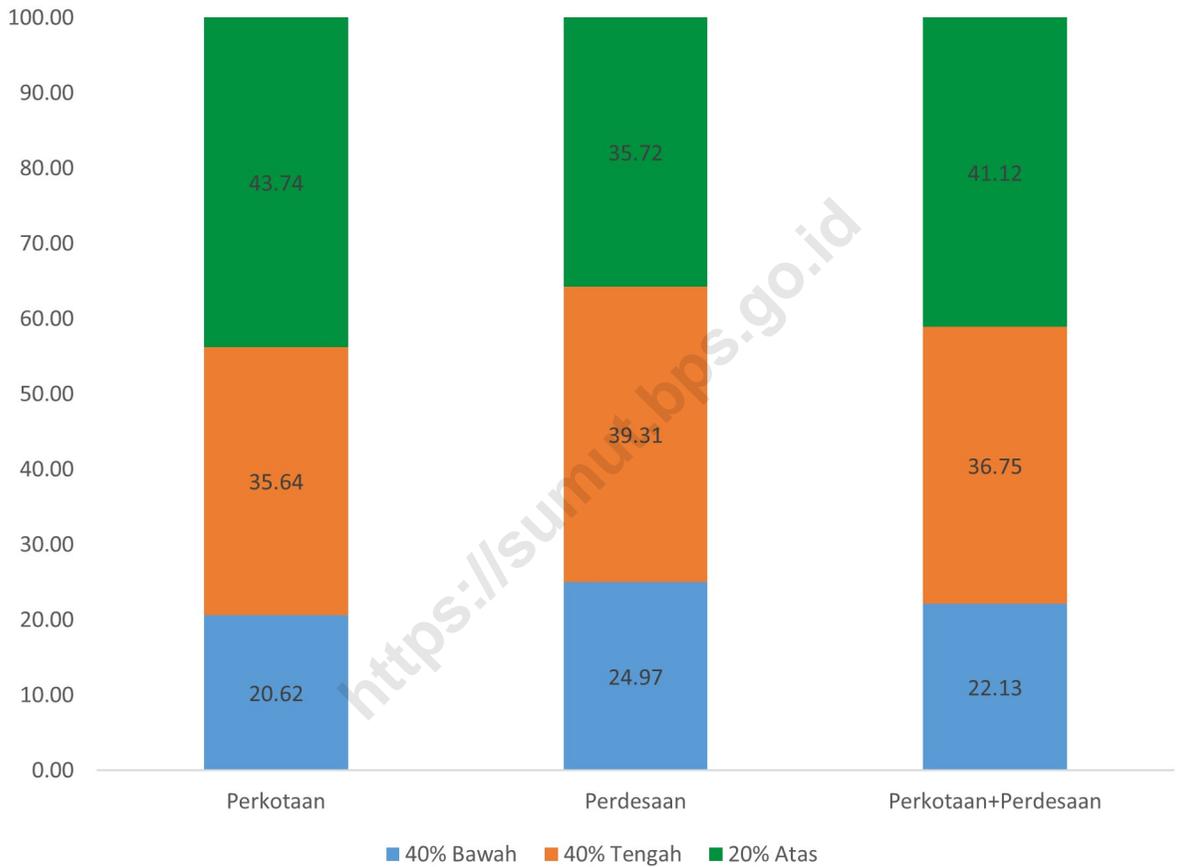


# DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (1990). *Indonesia: Poverty Assessment and Strategy Report*. Report, No. 8034-IND, Country Department III East Asia and Pacific Region. Washington.
- Bappenas. (2004). *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- BPS & World Bank Institute. (2002). *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*. Jakarta.
- BPS. (2014). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: BPS.
- Madden, D. dan Smith, F. (2000). *Poverty in Ireland, 1987-1994: A Stochastic Dominance Approach*. *The Economic and Social Review*, Vol. 31, 187-214.
- Ravallion, M. (1992). *Poverty Comparisons. A Guide to Concepts and Methods*. LSMS Working Paper Number 88, The World Bank, Washington, D.C.
- Todaro, Michael. P. (1989). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Erlangga (Terjemahan).
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- World Bank Institute. (2005). *Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual*. World Bank Institute.



# Distribusi Pengeluaran Penduduk Sumatera Utara menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2022





## Lampiran 1

### Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2022

Provinsi		Persentase Penduduk Miskin (%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
11	Aceh	10,31	16,87	14,64
12	Sumatera Utara	8,76	7,98	8,42
13	Sumatera Barat	4,95	6,86	5,92
14	Riau	6,34	7,08	6,78
15	Jambi	10,51	6,19	7,62
16	Sumatera Selatan	11,23	12,31	11,90
17	Bengkulu	14,88	14,49	14,62
18	Lampung	8,31	13,14	11,57
19	Bangka Belitung	3,09	6,26	4,45
21	Kepulauan Riau	5,68	10,68	6,24
31	DKI Jakarta	4,69	-	4,69
32	Jawa Barat	7,57	9,88	8,06
33	Jawa Tengah	9,92	12,04	10,93
34	DI Yogyakarta	10,56	13,65	11,34
35	Jawa Timur	7,71	13,69	10,38
36	Banten	5,73	7,46	6,16
51	Bali	4,23	5,39	4,57
52	Nusa Tenggara Barat	14,10	13,24	13,68
53	Nusa Tenggara Timur	8,84	23,86	20,05
61	Kalimantan Barat	4,44	8,06	6,73
62	Kalimantan Tengah	5,17	5,36	5,28
63	Kalimantan Selatan	3,64	5,31	4,49
64	Kalimantan Timur	4,80	9,64	6,31
65	Kalimantan Utara	5,66	8,75	6,77
71	Sulawesi Utara	5,14	9,77	7,28
72	Sulawesi Tengah	9,03	13,87	12,33
73	Sulawesi Selatan	5,07	11,63	8,63
74	Sulawesi Tenggara	6,95	13,57	11,17
75	Gorontalo	3,97	24,42	15,42
76	Sulawesi Barat	9,76	12,26	11,75
81	Maluku	5,82	23,50	15,97
82	Maluku Utara	5,18	6,66	6,23
91	Papua Barat	6,96	31,42	21,33
94	Papua	5,02	35,39	26,56
<b>INDONESIA</b>		<b>7,50</b>	<b>12,29</b>	<b>9,54</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

## Lampiran 2

### Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2022

	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
11	Aceh	193,32	613,49	806,82
12	Sumatera Utara	739,86	528,33	1.268,19
13	Sumatera Barat	137,61	197,60	335,21
14	Riau	181,82	303,21	485,03
15	Jambi	127,34	152,03	279,37
16	Sumatera Selatan	371,50	673,18	1.044,69
17	Bengkulu	100,69	196,54	297,23
18	Lampung	234,78	767,63	1.002,41
19	Bangka Belitung	26,48	40,30	66,78
21	Kepulauan Riau	122,60	29,08	151,68
31	DKI Jakarta	502,04	-	502,04
32	Jawa Barat	3.010,36	1.060,63	4.070,98
33	Jawa Tengah	1.818,25	2.013,20	3.831,44
34	DI Yogyakarta	315,46	139,30	454,76
35	Jawa Timur	1.721,46	2.459,83	4.181,29
36	Banten	566,49	247,54	814,02
51	Bali	136,06	69,62	205,68
52	Nusa Tenggara Barat	381,84	350,09	731,94
53	Nusa Tenggara Timur	126,80	1.004,83	1.131,62
61	Kalimantan Barat	85,04	265,21	350,25
62	Kalimantan Tengah	59,84	85,26	145,10
63	Kalimantan Selatan	77,77	117,93	195,70
64	Kalimantan Timur	123,59	112,66	236,25
65	Kalimantan Utara	26,55	22,91	49,46
71	Sulawesi Utara	70,42	114,72	185,14
72	Sulawesi Tengah	90,26	298,09	388,35
73	Sulawesi Selatan	208,53	568,91	777,44
74	Sulawesi Tenggara	69,94	239,85	309,79
75	Gorontalo	21,01	164,43	185,44
76	Sulawesi Barat	27,99	137,73	165,72
81	Maluku	45,12	245,45	290,57
82	Maluku Utara	19,09	60,79	79,87
91	Papua Barat	29,47	189,31	218,78
94	Papua	50,67	871,46	922,12
<b>INDONESIA</b>		<b>11.820,06</b>	<b>14.341,10</b>	<b>26.161,16</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

### Lampiran 3

#### Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2022

Provinsi		Gini Rasio		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
11	Aceh	0,348	0,272	0,311
12	Sumatera Utara	0,343	0,249	0,312
13	Sumatera Barat	0,329	0,247	0,300
14	Riau	0,363	0,282	0,326
15	Jambi	0,351	0,292	0,320
16	Sumatera Selatan	0,358	0,311	0,339
17	Bengkulu	0,370	0,262	0,315
18	Lampung	0,341	0,284	0,314
19	Bangka Belitung	0,248	0,206	0,236
21	Kepulauan Riau	0,342	0,247	0,342
31	DKI Jakarta	0,423	-	0,423
32	Jawa Barat	0,428	0,322	0,417
33	Jawa Tengah	0,404	0,322	0,374
34	DI Yogyakarta	0,446	0,332	0,439
35	Jawa Timur	0,388	0,323	0,371
36	Banten	0,367	0,287	0,363
51	Bali	0,371	0,294	0,363
52	Nusa Tenggara Barat	0,406	0,325	0,373
53	Nusa Tenggara Timur	0,324	0,304	0,334
61	Kalimantan Barat	0,342	0,265	0,314
62	Kalimantan Tengah	0,348	0,292	0,319
63	Kalimantan Selatan	0,345	0,263	0,317
64	Kalimantan Timur	0,334	0,283	0,327
65	Kalimantan Utara	0,269	0,269	0,272
71	Sulawesi Utara	0,362	0,354	0,365
72	Sulawesi Tengah	0,343	0,272	0,308
73	Sulawesi Selatan	0,388	0,336	0,377
74	Sulawesi Tenggara	0,404	0,352	0,387
75	Gorontalo	0,409	0,395	0,418
76	Sulawesi Barat	0,448	0,322	0,362
81	Maluku	0,297	0,259	0,301
82	Maluku Utara	0,300	0,247	0,279
91	Papua Barat	0,294	0,411	0,370
94	Papua	0,315	0,427	0,406
<b>INDONESIA</b>		<b>0,403</b>	<b>0,314</b>	<b>0,384</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

## Lampiran 4

### Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2022

Daerah: Perkotaan

Provinsi		Persentase Pengeluaran pada Kelompok Penduduk		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
11	Aceh	20,08	35,93	43,99
12	Sumatera Utara	20,62	35,64	43,74
13	Sumatera Barat	21,29	35,83	42,89
14	Riau	19,73	34,23	46,03
15	Jambi	19,79	36,41	43,79
16	Sumatera Selatan	18,34	38,54	43,12
17	Bengkulu	19,05	34,92	46,03
18	Lampung	20,70	35,56	43,74
19	Bangka Belitung	24,91	39,42	35,67
21	Kepulauan Riau	19,94	36,98	43,08
31	DKI Jakarta	16,60	33,22	50,18
32	Jawa Barat	15,77	34,16	50,07
33	Jawa Tengah	17,16	34,44	48,40
34	DI Yogyakarta	15,53	32,11	52,36
35	Jawa Timur	18,00	34,98	47,02
36	Banten	18,67	36,59	44,73
51	Bali	18,39	36,34	45,27
52	Nusa Tenggara Barat	17,58	33,84	48,58
53	Nusa Tenggara Timur	21,29	36,58	42,14
61	Kalimantan Barat	20,15	36,52	43,32
62	Kalimantan Tengah	19,29	37,99	42,72
63	Kalimantan Selatan	20,19	36,17	43,64
64	Kalimantan Timur	20,95	35,97	43,09
65	Kalimantan Utara	24,47	37,16	38,37
71	Sulawesi Utara	18,04	38,49	43,47
72	Sulawesi Tengah	19,80	37,27	42,93
73	Sulawesi Selatan	17,55	36,12	46,33
74	Sulawesi Tenggara	16,53	35,96	47,51
75	Gorontalo	17,00	33,74	49,25
76	Sulawesi Barat	15,39	31,73	52,87
81	Maluku	22,83	36,92	40,25
82	Maluku Utara	21,75	39,27	38,98
91	Papua Barat	22,47	38,40	39,12
94	Papua	21,89	36,79	41,32
<b>INDONESIA</b>		<b>17,07</b>	<b>35,01</b>	<b>47,93</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

**Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia  
Menurut Provinsi dan Daerah,  
Maret 2022**

**Daerah: Perdesaan**

Provinsi		Persentase Pengeluaran pada Kelompok Penduduk		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
11	Aceh	23,12	40,18	36,70
12	Sumatera Utara	24,97	39,31	35,72
13	Sumatera Barat	25,12	39,07	35,82
14	Riau	23,04	38,84	38,12
15	Jambi	22,36	38,93	38,71
16	Sumatera Selatan	20,98	39,29	39,73
17	Bengkulu	23,81	40,25	35,94
18	Lampung	22,85	38,88	38,27
19	Bangka Belitung	27,18	40,45	32,37
21	Kepulauan Riau	24,82	39,64	35,54
31	DKI Jakarta			
32	Jawa Barat	20,79	38,15	41,05
33	Jawa Tengah	20,64	38,42	40,94
34	DI Yogyakarta	20,88	36,34	42,78
35	Jawa Timur	20,76	37,96	41,27
36	Banten	22,53	38,98	38,49
51	Bali	21,73	39,98	38,29
52	Nusa Tenggara Barat	20,00	39,49	40,51
53	Nusa Tenggara Timur	22,16	37,66	40,18
61	Kalimantan Barat	23,40	40,41	36,19
62	Kalimantan Tengah	22,50	38,66	38,85
63	Kalimantan Selatan	23,86	39,56	36,58
64	Kalimantan Timur	23,07	38,59	38,33
65	Kalimantan Utara	23,96	38,16	37,89
71	Sulawesi Utara	18,92	37,71	43,37
72	Sulawesi Tengah	23,36	39,64	37,00
73	Sulawesi Selatan	19,55	38,99	41,46
74	Sulawesi Tenggara	18,84	38,37	42,79
75	Gorontalo	16,77	36,51	46,72
76	Sulawesi Barat	20,61	38,96	40,43
81	Maluku	24,51	38,68	36,81
82	Maluku Utara	24,60	40,23	35,18
91	Papua Barat	16,35	35,15	48,51
94	Papua	15,12	35,22	49,66
<b>INDONESIA</b>		<b>21,01</b>	<b>38,91</b>	<b>40,08</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

**Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia  
Menurut Provinsi dan Daerah,  
Maret 2022**

**Daerah: Perkotaan + Perdesaan**

Provinsi		Persentase Pengeluaran pada Kelompok Penduduk		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
11	Aceh	21,54	38,24	40,21
12	Sumatera Utara	22,13	36,75	41,12
13	Sumatera Barat	22,79	36,88	40,33
14	Riau	21,30	36,62	42,08
15	Jambi	21,14	37,81	41,05
16	Sumatera Selatan	19,55	38,50	41,94
17	Bengkulu	21,62	37,74	40,64
18	Lampung	21,64	37,52	40,84
19	Bangka Belitung	25,59	39,64	34,77
21	Kepulauan Riau	20,02	36,97	43,02
31	DKI Jakarta	16,60	33,22	50,18
32	Jawa Barat	16,46	34,47	49,06
33	Jawa Tengah	18,51	35,91	45,58
34	DI Yogyakarta	16,07	32,32	51,61
35	Jawa Timur	18,73	35,92	45,34
36	Banten	18,99	36,56	44,45
51	Bali	18,82	36,90	44,28
52	Nusa Tenggara Barat	18,60	36,26	45,14
53	Nusa Tenggara Timur	20,56	37,26	42,18
61	Kalimantan Barat	21,48	38,01	40,51
62	Kalimantan Tengah	21,01	38,22	40,77
63	Kalimantan Selatan	21,49	37,48	41,03
64	Kalimantan Timur	21,28	36,54	42,18
65	Kalimantan Utara	24,07	37,67	38,26
71	Sulawesi Utara	18,11	37,98	43,91
72	Sulawesi Tengah	21,73	38,23	40,04
73	Sulawesi Selatan	17,93	36,95	45,12
74	Sulawesi Tenggara	17,38	36,74	45,88
75	Gorontalo	15,93	35,42	48,65
76	Sulawesi Barat	19,08	36,76	44,16
81	Maluku	22,31	37,90	39,80
82	Maluku Utara	23,04	39,36	37,60
91	Papua Barat	17,85	37,87	44,27
94	Papua	15,46	37,86	46,68
<b>INDONESIA</b>		<b>18,06</b>	<b>35,74</b>	<b>46,20</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2022

**ST 2023**

**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp : (061) 8452343, Fax : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : [bps1200@bps.go.id](mailto:bps1200@bps.go.id)

ISSN 2615-8620



9 772615 862007